



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PIDATO KETUA BPK RI

PADA

**UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-71
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
15 JANUARI 2018**

Yang terhormat, Wakil Ketua dan para Anggota BPK;

**Yang terhormat, Para Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota BPK
periode yang lalu;**

Yang saya hormati, Para Pejabat Eselon I yang lalu;

Yang saya hormati, Para Pejabat Struktural dan Fungsional;

Serta seluruh Pegawai BPK yang berbahagia,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul disini dalam rangka melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Badan Pemeriksa Keuangan ke-71.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya secara pribadi dan atas nama Pimpinan BPK mengucapkan selamat hari ulang tahun BPK ke-71 kepada para pendahulu, para senior, rekan-rekan kerja, dan seluruh pegawai BPK beserta keluarga di manapun berada.

Peringatan HUT BPK ke-71 tahun mengangkat tema "**BPK Merajut Kebersamaan**". Tema ini sangat relevan karena dengan kebersamaan, kita dapat mengatasi semua tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Saudara-saudara keluarga besar BPK yang berbahagia,

Pada usia 71 tahun, telah banyak sumbangan BPK bagi kemajuan negara dan bangsa kita. Peningkatan opini WTP pada LKPP, LKKL, dan LKPD merupakan kontribusi besar BPK dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK juga terus mendorong penggunaan keuangan negara benar-benar ditujukan untuk pencapaian tujuan bernegara. BPK berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas proses pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaannya serta terus memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitasnya. Dengan demikian, diharapkan BPK dapat meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Selama kurun waktu 12 tahun terakhir, BPK telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp132,16 triliun berasal dari rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah selesai ditindaklanjuti. Selain itu, BPK telah membantu aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses penegakan hukum. Selama periode 2003 sampai dengan 2017, BPK menyerahkan 447 temuan berindikasi pidana senilai Rp44,74 triliun. Selama periode 2013 sampai dengan 2017, BPK menerbitkan laporan hasil penghitungan kerugian negara sebanyak 120 kasus senilai Rp56,93 triliun.

Di tingkat internasional, BPK telah meningkatkan peran dan kontribusinya. BPK terpilih menjadi anggota *external auditor* independen untuk *International Anti Corruption Academy* (IACA). BPK juga menjadi anggota panel *external auditor* PBB yang bertugas sebagai lembaga pemeriksa untuk badan-badan dalam komunitas PBB. BPK terpilih kembali menjadi *external auditor* bagi Badan Atom Dunia atau *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk periode 2017-2019. Hal ini merupakan bentuk kepercayaan dunia internasional kepada BPK.

BPK juga kembali memimpin Kelompok Kerja terbesar dalam organisasi lembaga pemeriksa sedunia (INTOSAI) yaitu *Working Group on Environmental Audit* untuk periode 2017-2019. Selain itu, BPK terlibat pada hampir seluruh *Working Group* INTOSAI, termasuk saat ini BPK akan bergabung dengan *Working Group on Big Data* yang sejalan dengan arah BPK menjadi *IT-driven organization*. Di tingkat regional, BPK juga menjadi pengurus organisasi BPK se-Asia (ASOSAI). BPK juga menjadi pendiri ASEANSAI dan saat ini dipercaya sebagai *Long Term Secretariat* ASEANSAI periode 2017 – 2023.

Saat ini, BPK aktif dalam forum-forum dunia terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan pemeriksaannya. BPK terlibat dalam pengembangan pedoman pemeriksaan SDGs di lingkungan INTOSAI. Di Indonesia, BPK sedang melakukan persiapan pemeriksaan kesiapan SDGs, pemeriksaan kinerja atas capaian SDGs, serta pemeriksaan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan untuk mendukung pencapaian SDGs.

Saudara-saudara insan BPK yang saya banggakan,

Selama periode Renstra 2016-2020, BPK berupaya untuk menyinergikan strategi pemeriksaan dengan agenda pembangunan nasional. BPK melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan tema dan fokus pemeriksaan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) untuk dapat menyimpulkan atau menilai lebih dalam pencapaian Pemerintah dalam melaksanakan RPJMN tersebut. Oleh karena itu, kita harus memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi setiap satuan kerja dalam melaksanakan strategi pemeriksaan ini. Strategi pemeriksaan yang kita laksanakan diharapkan meningkatkan nilai dan manfaat lembaga pemeriksa terhadap kehidupan rakyat.

Upaya melaksanakan strategi pemeriksaan sesuai dengan renstra ini bukan hanya memberikan manfaat bagi *stakeholder* kita, namun juga bisa meningkatkan kepercayaan publik kepada BPK yang kita cintai ini. Dengan kepercayaan tersebut, reputasi BPK akan semakin baik dalam mengawal pembangunan nasional dan turut berperan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan itu, BPK berkomitmen untuk meningkatkan penguatan kinerja pemeriksaan dan kelembagaan melalui tata kelola organisasi yang berintegritas, independen dan profesional. BPK telah membangun sistem pengendalian dan pengawasan intern, *whistle blowing system*, dan mekanisme pengaduan masyarakat, serta memiliki Majelis Kehormatan Kode Etik, guna mencegah dan memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme BPK.

Pada bidang pengelolaan sumber daya manusia (SDM), khususnya jabatan fungsional, saat ini BPK tengah mengajukan perubahan Peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP). Pengajuan revisi ini bertujuan untuk menyesuaikan peraturan tentang JFP tersebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

BPK juga menerbitkan keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 498 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam JFP melalui Penyesuaian/ *Inpassing*, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2018. Dengan ketentuan ini, maka PNS yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam keputusan tersebut, dapat diangkat menjadi JFP melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing* setelah lulus uji kompetensi JFP. PNS yang diangkat melalui penyesuaian/ *inpassing* dapat menduduki JFP sesuai dengan kepangkatan terakhir yang dimiliki PNS yang bersangkutan, sebagai contoh untuk golongan ruang III/A dan III/b dapat menduduki jabatan Pemeriksa pertama dan untuk golongan ruang III/c dan III/d dapat menduduki jabatan Pemeriksa Muda.

Sedangkan pada aspek reformasi kelembagaan, khususnya proses bisnis/ketatalaksanaan, telah dilakukan penyempurnaan proses pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui pengembangan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat menyinergikan hubungan antara BPK dan entitas dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Sebagai kelanjutan dari kegiatan tersebut, BPK akan menyempurnakan dan mengoptimalkan proses bisnis pemeriksaan dengan memanfaatkan teknologi informasi (*e-government*) sehingga proses pemeriksaan ke depan akan lebih efektif, efisien, berkualitas dan transparan.

Selain itu, Inspektorat Utama BPK mendapatkan predikat tingkat kapabilitas level 3 (*Integrated*) dari the *Institute of Internal Auditor* pada tahun 2017. Sedangkan, pemerintah melalui RPJMN 2015-2019 menargetkan kapabilitas *internal auditor* mencapai level 3 pada 2019. Hal tersebut membuktikan bahwa BPK telah melaksanakan tata kelola dan praktik-praktik pemerolehan keyakinan mutu dan pemberian jasa konsultasi secara profesional di lingkungannya sesuai dengan kriteria internasional.

Dengan semangat sinergi antara lembaga pemeriksa BPK dan lembaga pengawas internal, BPK telah mengembangkan Pusdiklat menjadi unit Eselon I, yaitu Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang telah ditetapkan pada akhir September 2017. Badan Diklat diharapkan menjadi wadah sinergi antara BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah serta Pengawas Internal pada BUMN/ BUMD/ Lembaga Lainnya melalui peningkatan peran Badan Diklat dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, serta akreditasi. Melalui sinergi ini diharapkan pemeriksaan menjadi lebih efisien, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi lebih efektif, serta pengelolaan keuangan negara menjadi lebih akuntabel dan transparan.

Saudara sekalian warga BPK yang berbahagia,

Pada tahun 2017 yang lalu, BPK mengalami berbagai macam ujian. Kita harus menyadari bahwa proses bisnis BPK memiliki risiko tinggi, rawan terhadap gangguan independensi dan integritas misalnya penawaran fasilitas yang dibiayai oleh entitas. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kembali, marilah kita untuk selalu menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme agar martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK selalu terjaga.

Marilah kita senantiasa meminta bimbingan dan petunjuk Allah Yang Maha Kuasa agar menguatkan kita dalam membangun bangsa dan negara ini. Semoga semua langkah kita dijadikan sebagai ladang amal ibadah dan kebaikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Aamiin.

Wabillahitaufik Walhidayah,

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dirgahayu BPK!

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,**

Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA.